

**PENERAPAN PRINSIP NON DISKRIMINASI DALAM PEMBERIAN  
BEASISWA OLEH PEMERINTAH**



Disusun Oleh :

**MOKHAMAD MAKRUS**

**NIM : 02113055**

**PRO PATRIA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NARETAMA**

**SURABAYA**

**2016**

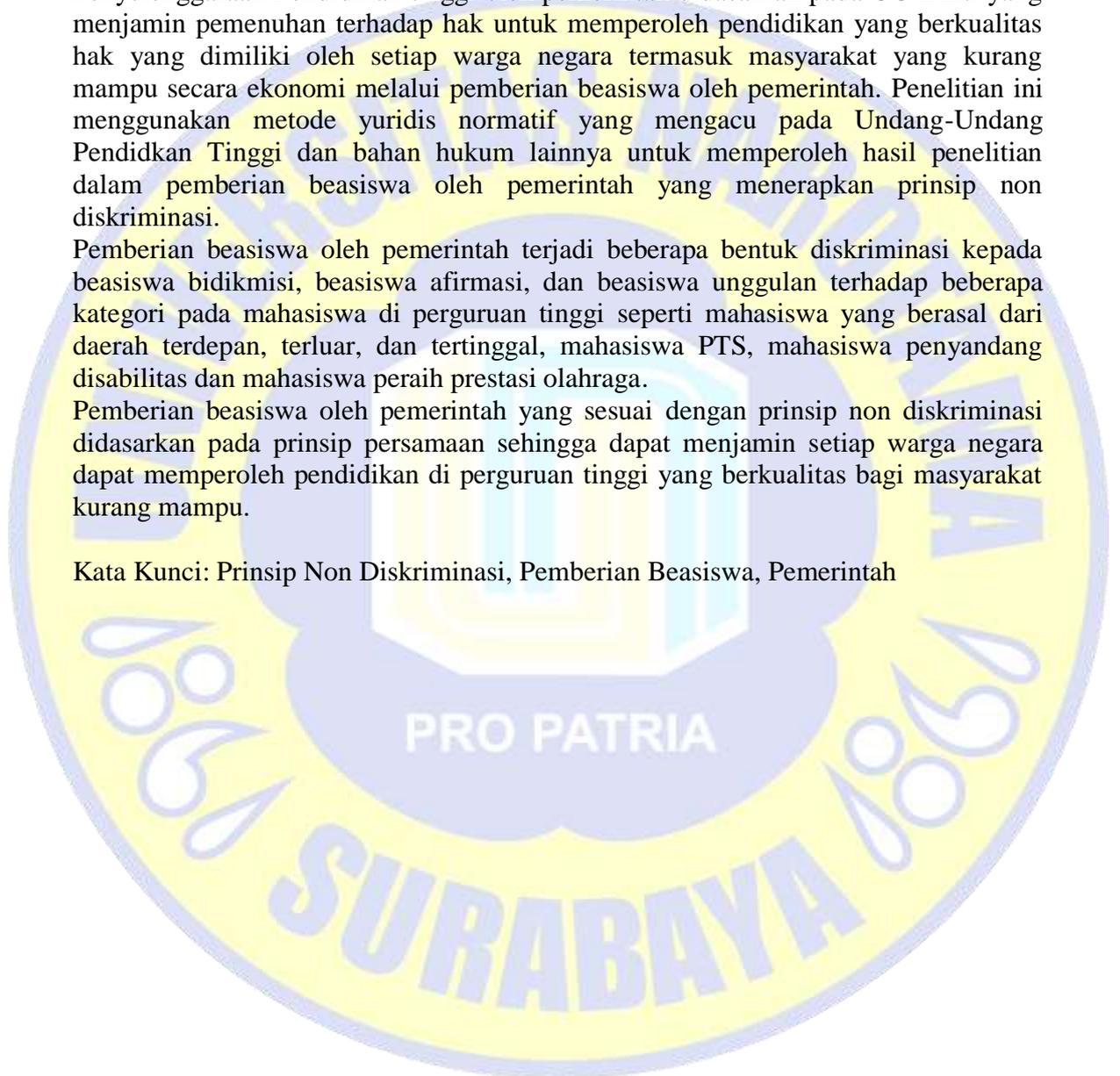
## ABSTRAK

Pendidikan merupakan hak yang dimiliki oleh setiap warga negara sesuai pasal 31 UUD NRI 1945. Hak untuk menempuh pendidikan dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi yang berkualitas menjadi tanggungjawab pemerintah. Penyelenggaraan Pendidikan tinggi oleh pemerintah didasarkan pada UU Dikti yang menjamin pemenuhan terhadap hak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas hak yang dimiliki oleh setiap warga negara termasuk masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi melalui pemberian beasiswa oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang mengacu pada Undang-Undang Pendidikan Tinggi dan bahan hukum lainnya untuk memperoleh hasil penelitian dalam pemberian beasiswa oleh pemerintah yang menerapkan prinsip non diskriminasi.

Pemberian beasiswa oleh pemerintah terjadi beberapa bentuk diskriminasi kepada beasiswa bidikmisi, beasiswa afirmasi, dan beasiswa unggulan terhadap beberapa kategori pada mahasiswa di perguruan tinggi seperti mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, mahasiswa PTS, mahasiswa penyandang disabilitas dan mahasiswa peraih prestasi olahraga.

Pemberian beasiswa oleh pemerintah yang sesuai dengan prinsip non diskriminasi didasarkan pada prinsip persamaan sehingga dapat menjamin setiap warga negara dapat memperoleh pendidikan di perguruan tinggi yang berkualitas bagi masyarakat kurang mampu.

Kata Kunci: Prinsip Non Diskriminasi, Pemberian Beasiswa, Pemerintah



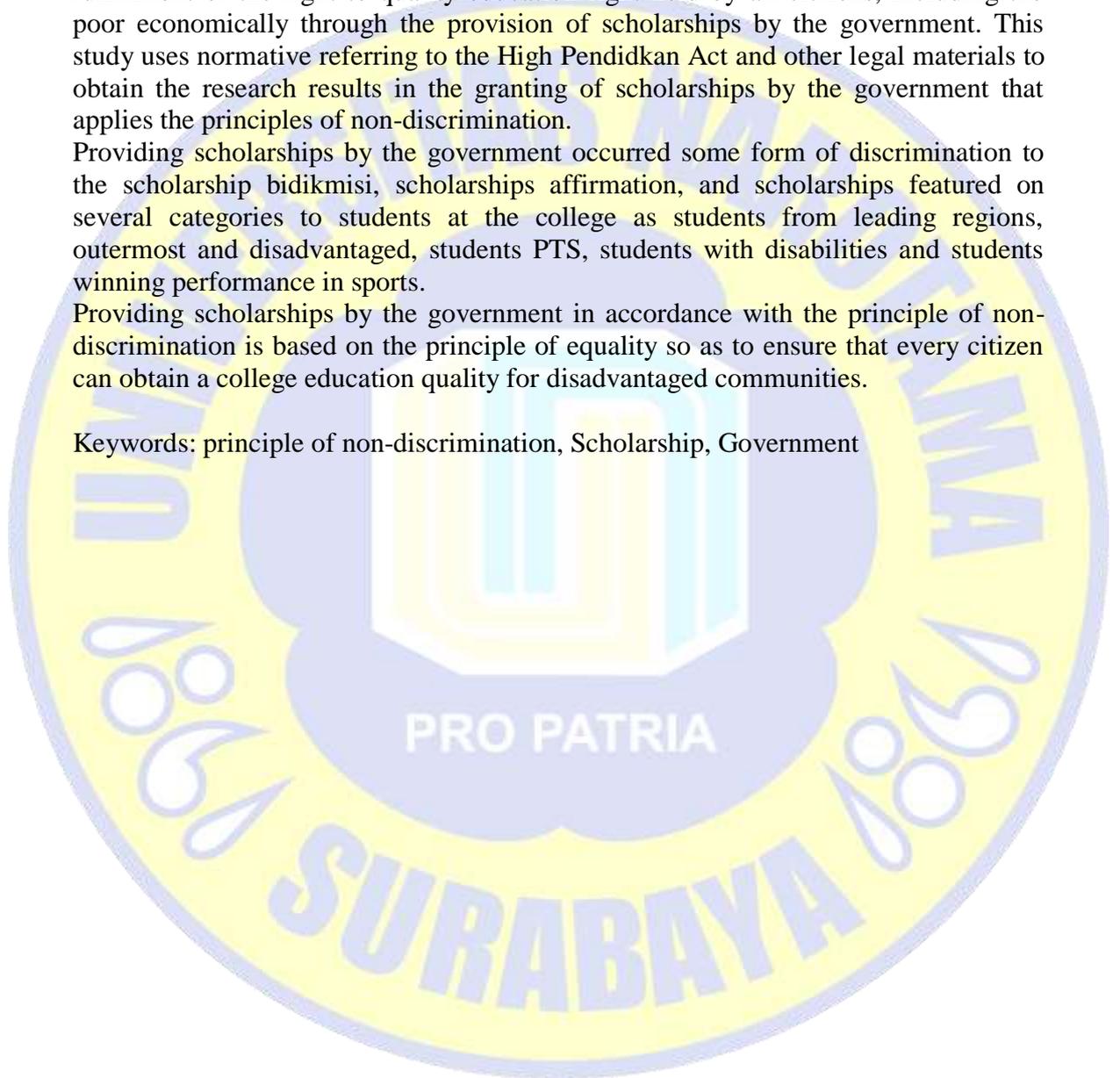
## ABSTRACT

Education is a right held by every citizen in accordance with Article 31, the Constitution NRI 1945. The right to education from primary education up to high-quality education is the responsibility of the government. Implementation of higher education by the government is based on the Higher Education Act that guarantee the fulfillment of the right to quality education right held by all citizens, including the poor economically through the provision of scholarships by the government. This study uses normative referring to the High Pendidikan Act and other legal materials to obtain the research results in the granting of scholarships by the government that applies the principles of non-discrimination.

Providing scholarships by the government occurred some form of discrimination to the scholarship bidikmisi, scholarships affirmation, and scholarships featured on several categories to students at the college as students from leading regions, outermost and disadvantaged, students PTS, students with disabilities and students winning performance in sports.

Providing scholarships by the government in accordance with the principle of non-discrimination is based on the principle of equality so as to ensure that every citizen can obtain a college education quality for disadvantaged communities.

Keywords: principle of non-discrimination, Scholarship, Government



## DAFTAR ISI

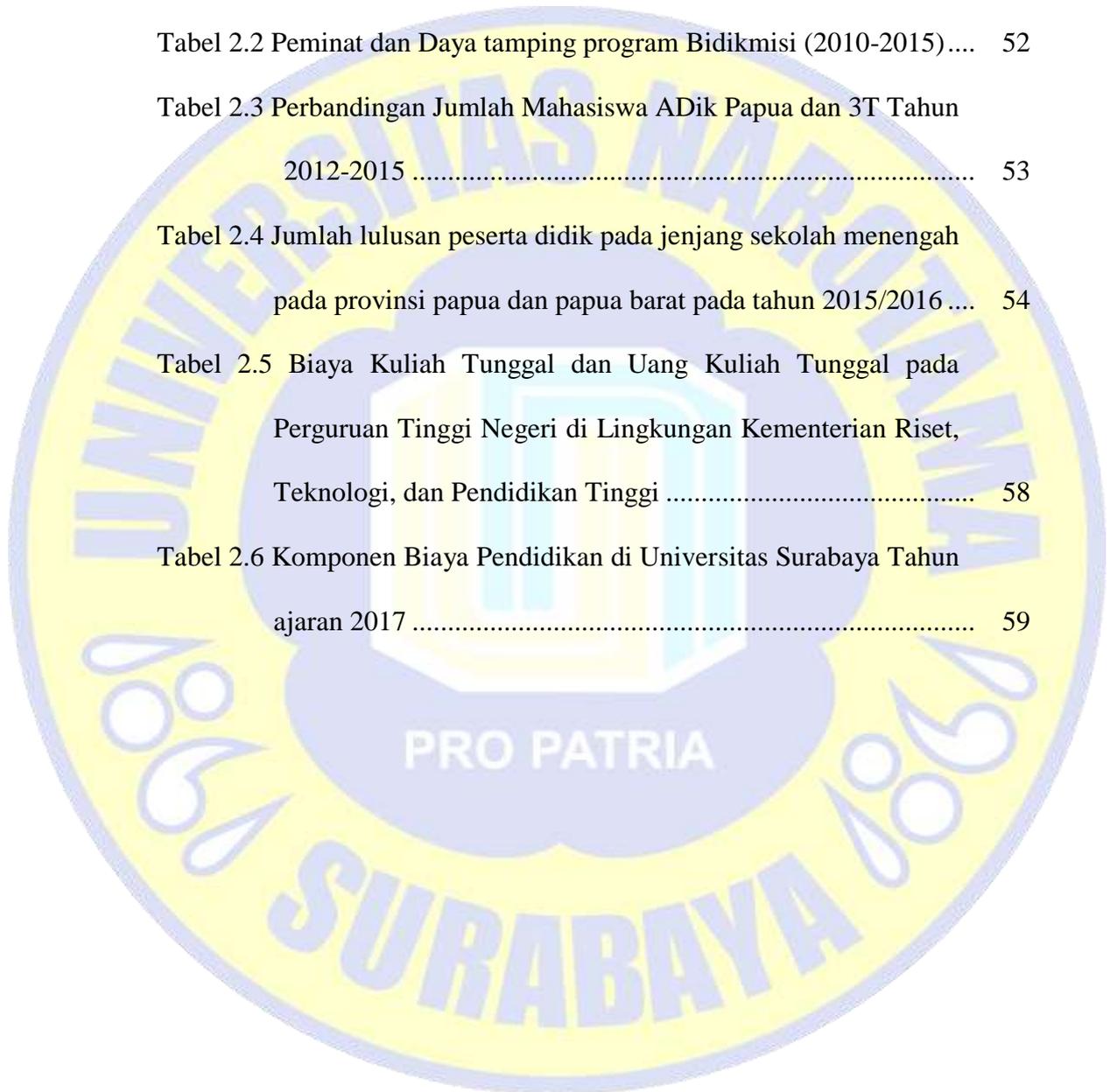
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK (Bahasa Indonesia).....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT (Bahasa Inggris).....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusan .....	1
1.2 Penjelasan Judul.....	7
1.3 Alasan Pemilihan Judul.....	8
1.4 Tujuan Penelitian .....	11
1.5 Manfaat Penelitian .....	11
1.6 Metode Penelitian.....	12
1.7 Pertanggungjawaban Sistematis.....	17
<b>BAB II: BENTUK-BENTUK PEMBERIAN BEASISWA OLEH PEMERINTAH YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP NON DISKRIMINASI.....</b>	<b>19</b>
2.1 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi .....	19
2.2 Jenis-Jenis Pendidikan Tinggi.....	26

2.3 Penyelenggaraan Beasiswa Oleh Pemerintah .....	36
2.4 Prinsip Non Diskriminasi .....	39
2.5 Bentuk Diskriminasi Dalam Pemberian Beasiswa Oleh Pemerintah...	44
2.5.1 Mahasiswa dari Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal.....	48
2.5.2 Mahasiswa dari Perguruan Tinggi Swasta .....	55
2.5.3 Mahasiswa Penyandang Disabilitas .....	60
2.5.4 Mahasiswa Peraih Prestasi Olahraga .....	64
<b>BAB III: BENTUK PEMBERIAN BEASISWA OLEH PEMERINTAH YANG SESUAI DENGAN PRINSIP NON DISKRIMINASI .....</b>	<b>68</b>
3.1 Penyelenggaraan Pendanaan Pendidikan Tinggi .....	65
3.2 Penerapan Prinsip Non Diskriminasi Dalam Pemberian Beasiswa Oleh Pemerintah.....	78
3.2.1 Persamaan pemberian beasiswa antara mahasiswa dari PTN dan PTS.....	79
3.2.2 Persamaan pemberian beasiswa antara mahasiswa dari daerah terdepan, terluar dan tertinggal .....	82
3.2.3 Persamaan pemberian beasiswa antara mahasiswa prestasi olahraga dan prestasi sains.....	85
3.2.4 Persamaan pemberian beasiswa antara mahasiswa penyandang disabilitas dan non disabilitas .....	90
<b>BAB IV: PENUTUP.....</b>	<b>95</b>
4.1 Kesimpulan .....	95
4.2 Saran.....	96

**DAFTAR PUSTAKA ..... 97**

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Jumlah peserta dan lulusan menurut jenis kelamin pada jenjang pendidikan menengah Tahun 2015/2016 .....	50
Tabel 2.2 Peminat dan Daya tampung program Bidikmisi (2010-2015)....	52
Tabel 2.3 Perbandingan Jumlah Mahasiswa ADik Papua dan 3T Tahun 2012-2015 .....	53
Tabel 2.4 Jumlah lulusan peserta didik pada jenjang sekolah menengah pada provinsi papua dan papua barat pada tahun 2015/2016 ....	54
Tabel 2.5 Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi .....	58
Tabel 2.6 Komponen Biaya Pendidikan di Universitas Surabaya Tahun ajaran 2017 .....	59



## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

- a. Dalam bentuk-bentuk pemberian beasiswa oleh pemerintah terdapat diskriminasi dalam pemberian beasiswa dikarenakan pemenuhan hak atas pendidikan yang berkualitas terhadap setiap warga negara dan akses berkeadilan bagi masyarakat kurang mampu secara ekonomi seperti diamanahkan dalam UUD NRI 1945 belum sepenuhnya tercapai karena kewajiban pemerintah masih sampai pada jenjang pendidikan menengah sehingga pada jenjang pendidikan tinggi terjadi berbagai bentuk diskriminasi dalam pemberian beasiswa pemerintah seperti pada mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal yang belum bisa terpenuhi haknya melalui beasiswa bidikmisi dan beasiswa afirmasi, mahasiswa yang berasal dari PTS yang harus menanggung biaya lebih besar dibanding pada PTN padahal memiliki hak yang sama atas pendidikan, beasiswa unggulan yang belum berpihak pada mahasiswa penyandang disabilitas, dan pemberian beasiswa kepada peraih prestasi olahraga belum menjamin secara keseluruhan hak dan lebih mengarah pada peraih prestasi olimpiade sains internasional disbanding pada mahasiswa peraih prestasi olahraga.
- b. Pemberian beasiswa oleh pemerintah dilakukan berdasarkan prinsip non diskriminasi. Penerapan pemberian beasiswa tersebut mengacu pada prinsip persamaan sehingga dalam penerapannya dapat menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Prinsip persamaan tersebut dapat menjamin dalam pemberian beasiswa kepada mahasiswa PTN, PTS, mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, dan

tertinggal, mahasiswa penyandang disabilitas dan mahasiswa peraih prestasi olahraga maupun sains secara non diskriminasi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid I*, (Jakarta: Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006);
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II*, (Jakarta: Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006);
- Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busroh, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983);
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta: Paradigma, 2014);
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006);
- Kuntjoro Purbopranoto, *Hak-Hak Asasi Manusia dan Pancasila*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982);
- Rhona K. M. Smith, at.al, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008);
- Darmaningtyas dan Heranisty Nasution, *Pemenuhan Hak-Hak Atas Pendidikan-Jurnal HAM*, (Jakarta: KomnasHAM, 2012);
- Muladi (editor), *Hak Asasi Manusia-Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: PT Refika Utama, 2005);
- Saraswati. L. G., dkk, *Hak Asasi Manusia: Teori, Hukum, Kasus*, (Depok: Filsafat UI Press, 2006);
- M. Syahbuddin Latief (editor), *Jalan Kemanusiaan, Panduan untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, 1999);
- Stanley Adi Prastyo, *Pemberian Jaminan Sosial dalam Hak Asasi Manusia-Jurnal HAM*, (Jakarta: KomnasHAM, 2012);
- Masyur Efendi dan Taufani Sukmana E, *HAM: Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik*, (Bogor: 2007, Ghalia Indonesia);
- Rukmini, Mimin, dkk, *Pengantar Memahami Hak Ekosob*, (Jakarta: Pattiro, 2006);
- Meriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia, 1980);
- Haryatmoko, *Menuju Orientasi Pendidikan Humanis dan Kritis*, (Jakarta: Depkominfo, 2008);
- I Made Subawa, *Hak Asasi Manusia Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya menurut Perubahan UUD 1945, Jurnal Kertha Patrika vol 3 No.1*, (2008);

- Jayadi Damanik dan Tim Peneliti, *Perlindungan dan Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Dalam Instrumen Internasional HAM, Peraturan Perundang-undangan Nasional dan Realisasinya di Indonesia*, (Jakarta, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2005);
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985);
- Fajri Nursyamsi. (et.al), *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia);
- Soerjono Soekanto, *Pengaturan Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1991);
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007);
- Mahfud MD, *Dasar dan Sumber Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta, UII Press, 1993);
- Ronny Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998);
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2002);
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009);
- Emeliana Krisnawati, *Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: UNTAG Press);
- All Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, wakaf*, (Bandung: 2008);
- Herlambang Perdana Wiratraman, R., *Hak-Hak Konstitusional Warga setelah amandemen UUD 1945: Konsep , Pengaturan, dan Dinamika Implementasi*, Jurnal Hukum Pantai Rei, Volume 1 Desember 2007;
- Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, (Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2008);
- Purwanta, Setia Adi, dkk, *Kertas Kerja: Pemenuhan Hak Difabel atas Pendidikan: Kebijakan, Pelaksanaan, dan Rekomendasi untuk Reformasi Hukum*, (Yogyakarta: PD Hidayat, 2008);
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Pusat Studi Hukum Tata Negara*, (Jakarta: FH-UI, 2004);
- Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003);
- Jimlie Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Jurnal Konsep Negara Hukum Indonesia, hal.8, yang diakses dari [www.jimly.com](http://www.jimly.com);
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987);

- Fajar, *Mahasiswa dan Budaya Akademik*, (Bandung: Rineka, 2002);
- Ali Chidir, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1999);
- Dedi, Supriadi, *Meningkatkan Citra dan Martabat Guru*, (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 1998);
- Regar Moenaf H, *Kilas Sorot Perkembangan Akuntansi di Indonesia-Akuntansi Indonesia di Tengah kancan perubahan*, (Jakarta: LP3ES, 2003);
- Irma Latifah Sihite, *Penerapan Affirmative Action sebagai upaya peningkatan keterwakilan perempuan dalam parlemen Indonesia*, Tesis Fakultas Hukum Program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Tahun 2011;
- Ann M. Beaton dan Francine Tougas, *Reaction to affirmative Action: Group Membership and Social Justice*, Social Justice Research, Vol. 14, No1, 2001;
- Hager, P. & Holland, S., *Graduate Attribute, Learning, and Employability*, (The Netherland: Springer, 2006);
- Jack Donnely, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, (London: Cornell University press, 2003);
- Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 4 cetakan, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2008);
- Andrey Sujatmoko, *Sejarah, Teori, Prinsip dan Kontroversi HAM*, *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*;
- Vegitya Ramadhani Putri, MA, LLM, *Prinsip-Prinsip Umum dalam HAM, Materi Perkuliahan Hukum dan HAM ke-3* Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Erwin Dwi Edi Wibowo, *Kebijakan Mutu Akademik Pendidikan Tinggi*, *Jurnal Administrasi Niaga FISIP Universitas Pandanaran*;
- Dra, Ocih Setiasih, M. Pd., *Hand Out Etika Profesi*
- Catrina Wahyu Dyah Purbaningrum dan Soenarto, *Pengembangan Model Pembelajaran Prakarya dan Kewirausahaan Dengan Prinsip The Great Young Entrepreneur di SMK untuk Kurikulum 2013*, *Jurnal Pendidikan Vokasi Universitas Negeri Yogyakarta* Tahun 2016;
- Zuhal, *Kekuatan daya saing Indonesia: Mempersiapkan masyarakat berbasis pengetahuan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008);
- I Made Suarta, *Pengembangan Kontruk Sistem Pembelajaran Pada Pendidikan Tinggi Vokasi*, *Jurnal Pendidikan Vokasi Politeknik Negeri Bali* Tahun 2012;
- Apriyansyah Putra dan Dhinna Yunika Hardiyanti, “*Penentuan Penerima Beasiswa Dengan Menggunakan Fuzzy Multiple Attribute Decission Making*”, *Jurnal Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya* Tahun 2011;

Satryo Soemantri Brodjonegoro, Guru Besar ITB dan Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Kompas tanggal 29 Juni 2013;

Nailil Hidayah, *Identifikasi Faktor-Faktor Pendukung Akademik Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang*, Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang Tahun 2016;

Wahyuningsih, *Prinsip Kesetaraan Gender dan Non Diskriminasi Dalam Kovenan ICESCR dan ICCPR*, Jurnal Hukum Prioris Universitas Pancasila Tahun 2008;

The Universal Declaration of Human Rights 1948;

Pedoman Umum Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan (BBP) Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) 2015;

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2016 tentang Biaya Kuliah Tunggal Dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pendidikan Khusus;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pemberian Beasiswa Kepada Peserta Didik Jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi Peraih Medali Pada Olimpiade Sains Internasional;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif (Pensif) bagi Peserta Didik yang memiliki Kelainan dan memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewah;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 259/KMK.05/2008

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XI/2013

<http://www.kemdikbud.go.id/main/tentang-kemdikbud/visi-dan-misi>

<http://www.dikti.go.id/visi-misi-strategi/>

<http://www.lpd.kemenkeu.go.id/profil/sejarah/>

<https://www.kemenag.go.id/artikel/12432/sejarah-kementerian-agama>

<https://www.kemenag.go.id/artikel/12433/visi-dan-misi-kementerian-agama>

<http://www.lpd.kemenkeu.go.id/profil/nilai-budaya/>

